

## PENGARUH PATRIOTISME, KORUPSI DAN PUNGLI TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAYAPURA

Mip Tahul Jannah<sup>1</sup>

[mimimiftah9@gmail.com](mailto:mimimiftah9@gmail.com)

Linda Y. Hutadjulu, SE., M.Si., Ak., CA<sup>2</sup>

Andika Rante, SE., M.SA<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the effect of Patriotism, Corruption and Illicit Payment on taxation compliance. The population in this study is the individual taxpayers who were enrolled in KPP Pratama Jayapura. The number of samples in this study as many as 100 respondents in the area of Jayapura. Sampling was done by using multiple regression analysis. The statistic description, validity, reability, classic assumption test, the coefficient of determination ( $R^2$  test), and partial regression test ( $t$  test) were tested in this research. Based on the result of data analysis indicated that the Patrotism has significant affect on tax compliance. However, Corruption and illicit payments have no significant affect on the tax compliance.*

**Keywords :** *Patriotism, Corruption and Illicit Payments*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak adalah kewajiban financial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan Negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik.

Dijaman sekarang, pajak adalah senjata untuk memperkuat sosial-ekonomi suatu bangsa sekaligus sebagai alat untuk menjaga keutuhan suatu Negara. Tanpa pajak Negara tak mampu menyediakan subsidi BBM, membangun fasilitas umum, jalan, jembatan, transportasi murah, menyediakan listrik yang terjangkau biayanya oleh masyarakat luas, sekolah-sekolah umum gratis hingga keseluruh pelosok negeri menyediakan keamanan bagi seluruh penduduk negeri dan pertahanan bagi bangsa dan Negara.

Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat diantaranya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN; PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan, pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar, dan bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB). Penerimaan-penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan social.

Faktor penentu kepatuhan wajib pajak sangat bervariasi, tidak hanya terbatas pada faktor eksternal seperti pengaruh sanksi dan audit perpajakan, namun juga faktor psikologi-sosial seperti patriotisme. Sebelum jaman kemerdekaan, patriotisme dimaknai sebagai upaya melawan penjajahan. Patriotisme menumbuhkan keterikatan antara bangsa dengan warga negaranya yang

<sup>1</sup> Alumni Jurusan Akuntansi FEB Uncen

<sup>2</sup> Dosen Jurusan Akuntansi FEB Uncen

<sup>3</sup> Dosen Jurusan Akuntansi FEB Uncen

ditandai dengan kecintaan seseorang terhadap bangsa dan kebanggaan terhadap identitas nasionalnya (Feshbach 1994 dalam Figueiredo dan Elkins, 2002). Rela berkorban demi kepentingan Negara merupakan wujud dari rasa patriotisme.

Setiap wajib pajak yang taat bayar pajak adalah patriot bangsa yang sangat berjasa dalam memperjuangkan kemakmuran, keamanan, kesejahteraan, kemajuan, keutuhan, dan keberlangsungan eksistensi nusa, bangsa dan negara melalui pajak. Permasalahan sekarang di Indonesia, dari total sekitar 60 juta pekerja aktif di Indonesia yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) baru sekitar 21 juta atau 35% yang ber-NPWP, dan dari 21 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) itu, baru sekitar 8,7 juta yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak. Estimasi sederhananya, baru 14,5% dari sekitar 60 juta warga Negara yang memiliki penghasilan diatas PTKP adalah juga patriot pajak bangsa.

Tingkat patriotisme seseorang di pengaruhi oleh kebijakan pemerintah (Konrad dan Qari 2009). Hasil dari kebijakan pemerintah dapat dilihat dari kinerja politik, ekonomi, sosial, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi. Belum optimalnya kinerja pemerintah diberbagai bidang tersebut dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dampaknya dapat menurunkan kontribusi masyarakat terhadap kesediaan berkorban untuk kepentingan Negara termasuk pembayaran pajak. Penelitian terdahulu (Qary et al., 2009; Konrad and Qary, 2009) menemukan adanya korelasi positif antara patriotisme dan kepatuhan wajib pajak. Tingkat patriotisme antar Negara tentu berlainan karena perbedaan karakteristik Negara dan kebijakan pemerintah.

Ditinjau dari perspektif pemerintahan, rendahnya partisipasi masyarakat untuk berkontribusi pada penerimaan Negara secara potensial juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap korupsi dan pungutan liar. Dana pajak dialokasikan untuk mensukseskan penyelenggaraan Negara termasuk pembangunan nasional. Korupsi mendistorsi alokasi tujuan tersebut sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada aparat pemerintah.

Korupsi di Indonesia umumnya berupa penyalahgunaan wewenang, pembayatan fiktif, kolusi/persekongkolan, biaya perjalanan dinas yang fiktif, penyalahgunaan fasilitas kantor, imbalan tidak resmi, pemberian fasilitas secara tidak adil, bekerja tidak sesuai ketentuan dan prosedur, tidak disiplin waktu, komisi atau transaksi jual/beli, yang tidak disetor ke Kas Negara, menunda/memperlambat pembayaran proyek, pengumpulan dana praktis, penyalahgunaan anggaran, menerima hadiah, menerima sumbangan dan Pungutan liar.

Pungutan liar atau biasa disebut Pungli telah menjamur di Indonesia. Pungli sendiri memiliki pengertian yaitu pemungutan yang dilakukan di tempat atau keadaan yang tidak seharusnya. Pungli dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi karena para pelaku pungli sama halnya menerima sesuatu diluar dari haknya. selain korupsi, pelaku pungli dapat juga digolongkan sebagai tindakan pemerasan dan penipuan.

Korupsi dan pungli sangat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat sekitar. Dampak korupsi yang terlihat secara langsung dan tidak langsung adalah kenaikan harga barang akibat anggaran APBN yang di korupsi, bertambahna rakyat miskin dikarenakan uang tunjangan bagi rakyat miskin yang seharusnya disalurkan dikorupsi, mahalnnya biaya yang harus rakyat keluarkan untuk mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang seharusnya bersubsidi, kesenjangan pendapatan semakin tinggi, banyaknya rakyat yang di PHK akibat perusahaan kecil tempat mereka kerja gulung tikar alias bangkrut akibat dana investasinya dikorupsi, pungli yang terjadi di instansi maupun lembaga akan mengganggu dan memberatkan masyarakat, pungli juga mempengaruhi iklim investasi, maraknya pungli akan berpengaruh pada merosotnya wibawa hukum, dan masih banyak lagi dampak negatif dari korupsi dan pungli.

Patriotisme dan korupsi saling berkaitan karena kurangnya rasa patriotisme menyebabkan ketidakpedulian masyarakat terhadap masa depan bangsa serta kecenderungan bersikap egois dan memprioritaskan kepentingan pribadinya (Ometeye , 2011). Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Harlinda Siska Pradini, Martdian Ratnasari, dan Trixa Eka Wahyu Hidayat tahun 2016. Hal yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada lokasi penelitian, waktu penelitian dan alat ukur yang digunakan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Patriotisme berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan?
2. Apakah Persepsi Korupsi dan Pungutan liar berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat mencapai tujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh tingkat patriotism terhadap kepatuhan perpajakan. Serta, untuk menguji dan mengetahui pengaruh korupsi dan pungutan liar terhadap kepatuhan perpajakan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Teori Identitas Sosial

Penelitian ini menggunakan teori identitas sosial dalam menjelaskan hubungan antara patriotisme dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Tajfel (1978 dalam Ashford et al., 1989), identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikasi nilai dan emosional dari anggota tersebut. Identitas sosial tersebut berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli, dan rasa bangga dari keanggotaan seseorang dalam kelompok tersebut. Berdasarkan perspektif teori identitas sosial dijelaskan pula bahwa dalam mengekspresikan dirinya, individu akan menonjolkan identitas diri dan identitas kelompok sosialnya.

Teori identitas sosial menjelaskan bahwa perasaan berharga individu sebagian terbentuk karena keanggotaannya dalam suatu kelompok. Bilamana identitas individu dibentuk oleh keanggotaan dalam suatu kelompok, maka diharapkan dapat menumbuhkan ikatan emosional yang menurunkan perasaan senasib dan sepenanggungan antara individu dan organisasi sehingga mempengaruhi perilaku nyata yang bermanfaat baik bagi individu maupun organisasinya. Hal tersebut mendorong kerelaan individu untuk berkorban demi pencapaian tujuan organisasi karena individu menganggap dirinya menjadi bagian dari organisasi.

Dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, rasa patriotisme sebagai bagian dari identitas sosial diharapkan dapat meningkatkan loyalitas wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena ketika wajib pajak sebagai anggota suatu Negara memiliki ikatan emosional dengan negaranya sehingga berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak.

Teori identitas sosial memberikan berbagai prediksi terhadap konsekuensi dari loyalitas nasional (Huddy and Khatib, 2007). Pertama, identitas sosial nasional diharapkan menjadi non ideologi yang melekatkan rasa ketertarikan subjektif individu pada suatu bangsa. Kedua, identitas nasional yang kuat diperkirakan mampu meningkatkan keterlibatan politik. Penelitian Lavoie (2011) menegaskan individu dengan tingkat patriotik lebih tinggi cenderung lebih sukarela mematuhi hukum perpajakan.

### 2.2 Teori *Bad Apple*

Teori ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan korupsi disebabkan oleh kecacatan moral dan terdapat hubungan kausal antara kecacatan moral dengan kecenderungan untuk melakukan korupsi. Seseorang memiliki kecacatan moral karena di dalam proses sosialisasi yang dia terima, dia “meresapi” nilai-nilai yang menyimpang dari masyarakat sehingga dia bertindak atas dasar nilai-nilai yang menyimpang yang dia terima pada proses sosialisasi itu sendiri.

Upaya pencegahan korupsi menurut *bad apple theories* ini adalah ketika akar permasalahan didalam pertanyaan mengapa seseorang melakukan korupsi dan jawabannya terletak pada *self-control* pada diri individu itu sendiri. agar dapat memperbaiki *self-control* yang ada dalam diri individu itu sendiri adalah dengan cara menciptakan norma-norma yang kuat Yazid (2014).

### 2.3 Pajak

Salah satu bentuk dari penerimaan Negara adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan kepada Negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat diantaranya seperti pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN; PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor.

### 2.4 Patriotisme

Patriotisme adalah jantung dari Sila ke 3, dan jantung Pancasila. Jiwa patriotisme akan selalu ada di setiap warga Negara Indonesia. Di suatu saat, mungkin semangat patriotisme bisa meredup, tetapi tidak akan pernah lenyap sepenuhnya. Semangat patriotisme bangsa ini pasti akan berkobar lagi saat dibutuhkan. Dalam skala kecil, semangat ini akan bangkit di saat ada warga Negara yang butuh bantuan atau teraniaya. Dan dalam skala besar semangat ini pasti akan bergelora di saat genting Negara, terutama di saat darurat perang.

Patriotisme diartikan sebagai semangat dan jiwa cinta tanah air. Patriotisme mengajarkan kepada setiap rakyat untuk selalu mencintai tanah air sebagai tempat berpijak, tempat hidup dan mencari penghidupan. Walaupun, sikap patriotisme ditunjukkan dengan rela berkorban demi bangsa dan Negara. Pengorbanan ini tidak sebatas pada tenaga dan waktu mereka, tetapi semua yang dimilikinya, seperti harta benda, keluarga, bahkan nyawa. Akan tetapi, setelah Indonesia merdeka, sikap patriotisme dirasakan sebagai suatu sikap yang harus dimiliki bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap patriotisme diharuskan sebagai dasar atau landasan untuk bertindak dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, Negara mengharuskan setiap warganya untuk berperan aktif dalam usaha mempertahankan keamanan. Peran ini dapat berupa kerelaan menyerahkan sebagian tanahnya guna pelebaran jalan atau pembuatan waduk dan membayar pajak tepat pada waktunya.

### 2.5 Korupsi

Korupsi merupakan suatu istilah yang sangat luas pengertiannya. Pavarala (1996) membagi dua kelompok pengertian yang dipergunakan dalam pandangan legal atau yang disebut korupsi dalam pengertian sempit. Kedua adalah pengertian korupsi yang lebih luas yang dilihat bukan hanya legal namun lebih dari itu yakni memperhatikan moral dan etika. Dalam arti sempit, korupsi didefinisikan sebagai penyuapan (*bribery*), penggunaan barang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya (*misappropriation of public resource*), komisi (*kickbacks and commissions*), penyelewengan (*embezzlement*), pemberian melebihi nilai yang diperkenankan (*gifts beyond a certain value*), dan menjual kantor publik (*sale of public office*).

Bagaikan virus yang berbahaya korupsi dapat menimbulkan wabah secara luas terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi merupakan segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri atau kalangan sendiri yang sangat didrahasiakan terhadap pihak-pihak di luar kalangan itu sendiri (Vito Tanzi, 1998).

### 2.6 Pungutan Liar

Proses memberi dan menerima dan kemudian mencapai bentuk yang mapan, dari sudut hukum disebut sebagai "pungutan liar". Hal ini sudah lama mewabah di masyarakat Indonesia. Melalui instruksi Presiden R.I No.9 Tahun 1997 tentang Operasi Tertib, di masa orde baru berkuasa, telah dilancarkan operasi tertib, yang bermaksud menanggulangi pungli, di dalam usahanya mewujudkan keadaan pemerintahan yang diidamkan, yang mencerminkan pelayanan masyarakat.

## 2.7 Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terhutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan dan kesadaran perpajakan secara kualitatif memiliki sebagai berikut; pengertian kesadaran pajak dianggap mempunyai nilai lebih daripada kepatuhan perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa terlalu memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul justru karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Meskipun demikian, dalam praktek sulit untuk membedakan apakah seorang wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadarannya ataukah dimotivasi oleh kepatuhannya.

## 2.8 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

### 2.8.1 Pengaruh Patriotisme Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Davidov (2009) menjelaskan bahwa kelekatan individu sebagai bagian dari suatu Negara diekspresikan dengan rasa memiliki, cinta, loyalitas, kebanggaan, dan perlindungan terhadap kelompok dan tanah-airnya. Tajfel and Turner (1986) menyatakan bahwa secara umum identitas sosial menggambarkan perasaan subjektif terhadap suatu bangsa, yang pada dasarnya bersifat positif. Salah satu bentuk dari identitas nasional adalah Patriotisme (Blank and Smith, 2003). Staub (1998) mendefinisikan patriotisme sebagai keterikatan seorang pada kelompoknya (suku, bangsa, partai politik dan sebagainya). Keterikatan ini meliputi kerelaan seseorang dalam mengidentifikasi dirinya pada suatu kelompok sosial untuk selanjutnya menjadi loyal (Staub, 1998).

Beberapa penelitian mengenai patriotisme dan kepatuhan pajak telah dilakukan, seperti penelitian Konrad and Qari (2009) membuktikan bahwa sikap patriotisme seseorang berhubungan dengan tingkat kepatuhan pajaknya. Hal tersebut dibuktikan dengan terdukungnya hipotesis penelitian yaitu Negara dengan penduduk yang memiliki sikap patriotik tinggi maka tingkat kepatuhan pajaknya juga tinggi. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa sikap patriotisme dapat mempermudah pencapaian penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan.

Dalam penelitian Pradini *et al* (2016) juga menyatakan bahwa patriotisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Lavoie (2011) bahwa semakin tinggi patriotik individu maka semakin besar kemungkinan individu tersebut berperan dalam mensukseskan tujuan bangsa dan secara sukarela patuh pada regulasi perpajakan yang berlaku.

Patriotisme secara langsung dapat mempengaruhi sikap kepatuhan seseorang terhadap pajak dan pada akhirnya juga meningkatkan norma-norma sosial (Lavoie, 2011). Jika membayar pajak dipandang sebagai faktor yang mendukung kesejahteraan bangsanya, maka individu dengan tingkat patriotik tinggi lebih patuh dan jujur dalam membayar pajak dibandingkan dengan individu yang tingkat patriotiknya rendah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:

*H1: Patriotisme berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak*

### 2.8.2 Pengaruh Korupsi dan Pungli Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Opini umum selalu mempersepsikan korupsi adalah hal negatif karena dianggap sebagai kejahatan sosial. (Mandescu, 2011). Korupsi juga tidak dapat dipandang secara parsial sebab berkaitan erat dengan isu yang lebih luas yaitu tata kelola dan manajemen publik (Ajaz and Ahmad, 2010). Dalam area pelayanan publik, penyuapan dan penyogokan dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi (Ajaz and Ahmad, 2010). Argumen positif terhadap praktik penyuapan pernah dilontarkan karena suap dianggap sebagai solusi untuk memperbaiki efisiensi birokrasi pemerintah yang lambat (Ketkar *et al.*, 2005). Namun faktanya, pembayaran ilegal justru dilakukan untuk tujuan-tujuan ilegal seperti penghindaran pajak, polusi lingkungan, jaminan kekebalan terhadap sanksi kriminal dan lain-lain (Ketkar *et al.*, 2005).

Dalam konteks kebijakan dan administrasi fiskal, korupsi dibedakan dalam tiga bentuk yaitu; korupsi terjadi pada sisi penerimaan yaitu proses pengumpulan sumber daya public, korupsi terjadi pada sisi pengeluaran yaitu proses pembelanjaan sumber daya dalam rangka penyediaan jasa dan pembangunan infrastruktur, dan korupsi terjadi saat perumusan regulasi ekonomi. Korupsi dalam siklus anggaran tersebut tentunya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Stigma negatif tersebut juga berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Negara termasuk pembayaran pajak.

Bird *et al* (2004 dalam Ajaz and Ahmad, 2010) menemukan peranan penting korupsi, hukum dan regulasi terhadap penentuan hasil penerimaan pajak. Konsisten dengan penelitian tersebut, Gupta (2007) juga menemukan bahwa korupsi memiliki dampak negatif signifikan terhadap kinerja penerimaan.

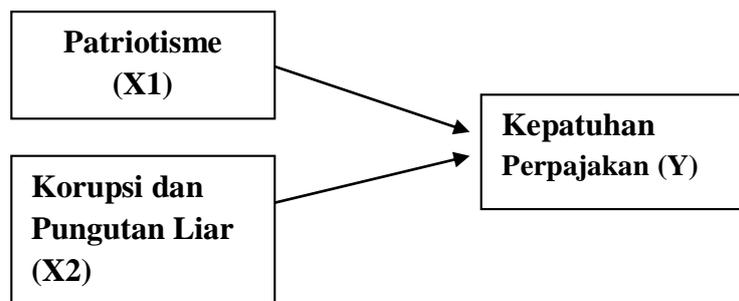
Pradini *et al* (2016) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak atas korupsi dan pungutan liar tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah:

*H2: Persepsi Korupsi dan Pungutan Liar berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak*

## 2.9 Model Penelitian

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Patriotisme serta persepsi Korupsi dan pungli. Sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Perpajakan.

**Gambar 1**  
**Model Penelitian**



*Sumber: Penulis (2017)*

## 3 METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *Causal Comparative Research* dimana penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiono 2016:62). Penelitian *Causal Comparative* ini juga termasuk penelitian yang mengidentifikasi fakta yang terjadi sebagai variabel yang dipengaruhi dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi.

Dilakukannya penelitian ini dengan maksud tujuan untuk melihat seberapa jauh Pengaruh Patriotisme, Korupsi dan Pungli terhadap Kepatuhan Perpajakan di kota Jayapura. Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data Kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Primer. Menurut Sekaran dan Bougie (2013), data primer diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada responden. Lokasi penelitian ini terletak di Jln. Otonom No.3 Kotaraja, Jayapura-Papua lebih tepatnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2016). Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak (orang pribadi) yang sudah mempunyai NPWP yang berada dalam wilayah KPP Pratama Jayapura. Sampel merupakan bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian (Sujarweni, 2014:65). Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara *Convenience Sampling* atau penyampelan dengan berdasarkan kemudahan.

### 3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

#### Variabel Dependen

Variable dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. sehingga, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Dimana mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan yang dimaksud diantaranya yaitu mengisi formulir dengan benar, menghitung pajak terutang dengan benar, membayar tepat waktu, melaporkan informasi ketika petugas membutuhkan informasi lebih, dan mematuhi kebijakan tersebut.

#### Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah patriotisme (X1). Patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan Negara. Patriotisme memiliki ciri-ciri yaitu: simpati terhadap bangsa, mampu melihat kekuatan dan kelemahan bangsa, rasa mempunyai identitas diri, dan bersifat terbuka. Pertanyaan tentang patriotisme diadopsi dari penelitian Pradini *et al* (2016).

Variabel independen yang kedua adalah Korupsi dan pungutan liar (X2). Penggunaan variabel korupsi dan pungutan liar dalam penelitian ini di adopsi dari penelitian Pradini *et al* (2016). Penelitian ini menggunakan skala likert untuk mengukur kepercayaan Wajib Pajak terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan penelitian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, apakah sudah terbebas atau belum dari unsur korupsi dan juga untuk menilai setuju atau tidaknya wajib pajak terhadap pertanyaan bahwa penyelenggara birokrasi di Indonesia telah bebas dari pungutan liar.

Pengukuran variabel Dependen dan Independen dalam penelitian ini menggunakan skala Likert 1-5, dimana 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju dan 5 = Sangat Setuju.

### 3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel dependen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Analisis ini untuk mengetahui arah pengaruh patriotisme, korupsi dan pungli terhadap kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak di Kota Jayapura. Adapun model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

<b>Y</b>	= Kepatuhan Perpajakan
<b><math>\alpha</math></b>	= Konstanta
<b><math>\beta_1</math></b>	= Koefisien regresi dari variabel patriotism
<b><math>\beta_2</math></b>	= Koefisien regresi dari variabel korupsi dan pungli

<b>X1</b>	= Patriotisme
<b>X2</b>	= Korupsi dan Pungli
<i>e</i>	= <i>Standard of error</i>

## 4 ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

### 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mampu memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan kemencengan distribusi (*skewness*) (Ghozali, 2016). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 62 dari 70 sampel penelitian yang diperoleh melalui kuisioner penelitian. Sampel tersebut merupakan jawaban atau pendapat para responden yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura. Yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil dari *Confinience sampling*, dimana para responden merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura. Adapun kriteria untuk pembagian kuisioner ini diberikan kepada wajib pajak yang telah memiliki NPWP.

Hasil pengolahan statistik deskriptif terhadap masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TP	62	73.00	125.00	95.4839	9.21997
TKPL	62	3.00	12.00	8.4032	1.72218
TKWP	62	15.00	25.00	20.0000	2.39535
Valid N (listwise)	62				

*Sumber:* Data diolah penulis (2017)

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif, nilai rata-rata (Mean) variabel patriotisme yaitu sebesar 95,48 dimana nilai minimumnya adalah 73 dan maksimumnya 125. Yang artinya responden lebihh banyak menjawab setuju dilihat dari nilai rata-rata yang mendekati angka maksimum 125. Variabel Korupsi dan Pungutan Liar dengan nilai rata-rata 8,40 nilai minimumnya 3 dan nilai maksimumnya sebesar 12. Yang artinya responden lebih banyak yang memilih netral dilihat dari nilai rata-rata 8,40 yang berada di antara nilai maksimum 12 dan minimum 3. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai rata-rata 20 dimana nilai minimumnya 15 dan maksimum 25. Yang artinya responden lebih memilih netral dilihat dari rata-rata 20 yang berada di antara nilai minimum 15 dan maksimum 25.

## 4.2 Pengujian Hipotesis

### 4.2.1 Analisis Uji T Parsial (Uji T)

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara individual (Parsial) terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari Patriotisme, Korupsi dan Pungli terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Jayapura. Hasil uji statistik parsial (uji t) dapat dilihat pada table 2 berikut ini:

**Tabel 2**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.594	2.704		.959	.341
Patriotisme	.169	.025	.652	6.662	.000
Korupsi dan Pungli	.147	.136	.105	1.078	.286

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan

Sumber: Data Diolah Penulis (2017)

Dimana dari hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini yaitu; H1 : Patriotisme mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan. Hasil yang ditunjukkan pada tabel 2 memiliki arti nilai t hitung > t tabel sebesar 6,662 > 1,671 dan signifikannya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 < 0,05 maka dapat dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan antara variabel Patriotisme terhadap Kepatuhan Perpajakan sehingga **H1 diterima**. Sedangkan, untuk hipotesis 2 yaitu; H2 : Korupsi dan Pungli mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan. Hasil yang ditunjukkan pada tabel 2 memiliki nilai t hitung < t tabel sebesar 1,078 < 1,671 dan signifikannya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,286 > 0,05 maka dapat dikatakan tidak mempunyai pengaruh signifikan antara variabel Korupsi dan Pungli terhadap Kepatuhan Perpajakan sehingga **H2 ditolak**.

Dengan melihat *unstandardized coefficient* dapat disimpulkan persamaan berikut

$$\text{KWP} = 2,594 + 0,169P + 0,147KPL + e$$

Dimana dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi hanya variabel P yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak, sementara variabel KPL tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Pengaruh Patriotisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Patriotisme berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, **H1: diterima**. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan jiwa patriotisme individu akan meningkatkan kepatuhannya sebagai wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Pradini *et all* (2016) dimana rasa patriotisme menumbuhkan kerelaan wajib pajak untuk berkontribusi pada kemakmuran, kesejahteraan, kemajuan, dan keberlangsungan bangsa termasuk melalui pembayaran pajak. Sama halnya dengan penelitian Adiningtyas (2016) bahwa patriotisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu sikap patriotisme dalam bidang ekonomi adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak sebagai bukti abdi dalam mensejahterahkan bangsa dan Negara. Kewajiban warga Negara dalam membayar pajak tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang.

Pajak tidak memberikan imbalan jasa secara langsung sebagaimana retribusi sehingga motivasi psikologi – sosial seperti patriotisme berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran wajib pajak terhadap perannya dalam pembangunan nasional. Makna patriotisme lebih luas dari cinta tanah air karena di sertai dengan kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara.

Patriotisme secara langsung dapat mempengaruhi sikap kepatuhan seseorang terhadap pajak dan pada akhirnya juga meningkatkan norma-norma sosial (Lavoie, 2011). Hal tersebut dikarenakan individu dengan patriotisme yang tinggi dan kuat terhadap bangsanya, maka individu dengan

tingkat patriotik tinggi lebih jujur dalam membayar pajak dibandingkan dengan individu yang tingkat patriotiknya rendah.

#### 4.3.2 Pengaruh Korupsi dan Pungli Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Korupsi dan Pungli tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, **H2: ditolak**. Peneliti menduga ketidakterdukungannya hipotesis tersebut dikarenakan perbedaan pemahaman dan persepsi dari para wajib pajak mengenai korupsi dan pungli. Dalam penelitian Pradini *et all* (2016) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas korupsi dan pungli tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan.

Didukung dengan penelitian Ajaz dan Ahmad (2010) yang menjelaskan bahwa korupsi tidak dapat dipandang secara parsial sebab berkaitan erat dengan isu yang lebih luas yaitu tata kelola dan manajemen public. Pernyataan tentang persepsi korupsi dan pungli dalam kuisioner belum mencakup semua dimensi dalam praktik korupsi dan pungli. Belum spesifiknya pernyataan tersebut diduga mempengaruhi persepsi individu terhadap variabel yang diteliti.

## 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Patriotisme, Korupsi dan Pungli terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada para Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura. Dalam penelitian ini terdapat 2 hipotesis yang diuji. Variabel dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak dan Variabel Independen yang digunakan adalah Patriotisme, Korupsi dan Pungli. Jumlah kuisioner yang dibagikan kepada para responden sebanyak 70, dan jumlah sampel yang dapat diolah sebanyak 62. Responden terpilih berdasarkan teknik *convenience sampling*, dimana para wajib pajak yang terdaftar yang secara kebetulan peneliti temui.

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan uji Parsial (t-test) menunjukkan bahwa Patriotisme mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jiwa patriotik seseorang, semakin patuh juga terhadap kewajibannya dalam membayar pajak.
2. Berdasarkan uji parsial (t-test) menunjukkan bahwa persepsi korupsi dan pungli tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. tidak terdukungnya hasil dari variabel ini karena perbedaan pemahaman dan persepsi antara wajib pajak satu dan lainnya. Serta pernyataan tentang korupsi dan pungli yang belum mencakup semua dimensi korupsi didalam kuisioner.

### 5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain Pertama, jumlah Variabel yang hanya terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Kedua, jumlah responden yang belum bisa menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dan hasil pembagian kuisioner banyak yang tidak kembali, hal ini dikarenakan aktivitas beberapa responden yang cukup padat sehingga tidak dapat mengisi kuisioner. Ketiga, untuk variabel korupsi dan pungli pernyataannya kurang mencakup semua dimensi dalam praktik korupsi dan pungli.

### 5.3 Saran

Saran ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya ataupun unuk akademis agar dapat mengisi kekurangan yang terdapat pada penelitian sebelumnya. Adapun saran dari peneiti yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan Peneliti selanjutnya dapat menggunakan cakupan sampel yang lebih luas. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain selain Patriotisme seperti perilaku-perilaku Wajib Pajak sebagai faktor yang dapat mempengaruhi proses kepatuhan

pajak seseorang serta membangun pengukuran yang lebih komprehensif untuk mengukur persepsi wajib pajak terhadap korupsi dan pengutan liar.

2. Diharapkan juga agar peneliti selanjutnya untuk memasukkan perbandingan hasil realisasi wajib pajak dari tahun sebelumnya dengan tahun dimana penelitian berlangsung, agar hasil yang didapatkan lebih akurat.
3. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh KPP Pratama Jayapura untuk lebih banyak mensosialisasikan tentang rasa cinta terhadap Negara untuk meingkatkan rasa patriotisme wajib pajak salah satunya dengan memenuhi kewajiban dalam perpajakan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ajaz, T and Ahmad, E. 2010. The Effect of Corruption and Governance on Tax Revenues, *The Pakistan Development Review*: 405-417.
- Adiningtyas, Rahmatika, 2016. *Pengaruh Kompetensi pembukuan, resiko pemeriksaan dan Patriotisme ekonomi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan.2014.*Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013*.[http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp\\_2013\\_1402973186.pdf](http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp_2013_1402973186.pdf). Di akses tanggal 2 Februari 2017
- Blank, T., and Schmidt, P. 2003. National Identity In a United Germany: Nationalism or Patritism? An empirical test with representative data, *Political Psychology*: 289-311.
- Davidov, Eldad. 2009. Measurement Equivalence of Nationalism and Constructive Patritism in the ISSP: 34 Countries in a Comparative Perspective, *Political Analysis*: 64-82.
- DJP. 2015. *Kinerja Kementerian Keuangan Terbaik di Pemerintahan*. <http://www.pajak.go.id/content/news/kinerja-kementerian-keuangan-terbaik-di-pemerintahan>. Diakses tanggal 8 Februari 2017
- Figueiredo, R. J. P de and Elkins, Z. 2002.*An Inquiry into the Vices of In-group Pride*.University of California, Berkeley.
- Huddy, L., and Khatib, Nadia. 2007. American Patriotism, National Identity, and Political Involvement, *American Journal of Political Science*: 63-77.
- Kementerian Keuangan RI. 2015. *Dirjen Pajak: tax Ratio Indonesia Masih rendah*. <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/Dirjen-pajak-tax-ratio-indonesia-masih-rendah>.
- Kementerian Keuangan RI. 2015. DJP: *Kesadaran Masyarakat Menjalanjan Kewajiban Perpajakan Meningkat*. <http://www.kemenkeu.go.id/en/kode45512>.
- Kementerian Keuangan RI. 2015. *Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2014 Capai Rp. 5.137,2Triliun*. <http://www.kemenkeu.go.id/berita/realisasi-pendapatan-negara-tahun-2014-capai-rp51372-triliun>.
- Ketkar, 2015. Impact of Corruption on Foreign Direct Investment and Tax Revenues, *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*: 313.
- Konrad, K.A., and Qary, S. 2009. *The Last Refuge of a Scoundrel?Patritism and Tax Compliance*.Discussion Paper Series. Iza dp No. 4121
- Lavoie, R. 2011. Patritiotism and Taxation: The Tax Compliance Implication of The Tea party Movement, *Loyola of Angeles Law Review*: 39-85
- Mandescu, I. 2011. *Tax Evasion and Corruption in The Development of Rumania*. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol. 4 (53), No. 2, Series V: Economic Sciences.
- Ometeye, Rotimi. 2011. Corruption and Underdevelopment: The Nigerian Experience. *Lumia*, Vol. 22, No. 1, ISSN 2094-1188.
- Pradini, H.S, Ratnasari M, Hidayat T.E.W. 2016. *Pengaruh Patriotisme, Korupsi dan Pungli Terhadap Kepatuhan Perpajakan*. Simposium Nasional Akuntansi XIX.Lampung.

- Qari 2009. *Patriotism, Taxation and International Mobility*. Discussion Paper Series, IZA DP No. 4120.
- Staub, E. 1978. *Positive Sosial Behavior and Morality: Social and personal influence*. New York, Academy Press.
- Tafjel, H., and Turner, J. C. 1986. *The Sosial Identity Theory of Intergroup Behavior*. Dalam S. Worchel and W. Austin (Eds), *Psychology of intergroup relation* (pp. 7-24). Chicago: Nelson Hall.
- Tempo. 2016. *Penerimaan Pajak Desember 2015 Rp 1.055,61 Triliun*. <http://m.tempo.co/read/news/2016/01/11/090734853/penerimaan-pajak-desember-2015-rp-1055-61-triliun>.
- Yasid, Ferdinan. 2014. *Upaya Pencegahan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Ditinjau dari Aspek Sosial Crime Prevention)*. Universitas Indonesia. Depok.
- Zona Siswa. 2014. *Pengertian Patriotisme*. [www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-patitisme.html?m=1](http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-patitisme.html?m=1). diakses tanggal 8 Februari 2017